



SKRIPSI

**OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA (PERBANDINGAN OMBUDSMAN
SWEDIA DAN INDONESIA)**

*OMBUDSMAN IN GOVERNMENTAL SYSTEM OF REPUBLIC
OF INDONESIA (A COMPARATIVE STUDY OF OMBUDSMAN
IN SWEDEN AND INDONESIA)*

DIAN WAHYU WIDOWATI

NIM 050710101009

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA (PERBANDINGAN OMBUDSMAN
SWEDIA DAN INDONESIA)**

*OMBUDSMAN IN GOVERNMENTAL SYSTEM OF REPUBLIC
OF INDONESIA (A COMPARATIVE STUDY OF OMBUDSMAN
IN SWEDEN AND INDONESIA)*

DIAN WAHYU WIDOWATI

NIM 050710101009

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

*“Guru yang biasa-biasa, berbicara
Guru yang bagus, menerangkan
Guru yang hebat, mendemonstrasikan
Guru yang agung, memberi inspirasi”.*

William Arthur Ward, 2009, *Kata-kata Motivasi Dosis Tinggi*,
MedPress:Yogyakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Suwito Sastro Atmodjo dan Ibunda Sri Wahyuni, yang telah membesarkan serta memberikan rasa kasih sayang yang tak ternilai harganya. Dan selalu memberikan kekuatan atas apa yang saya lakukan selama ini.*
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DIAN WAHYU WIDOWATI

NIM : 050710101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (PERBANDINGAN OMBUDSMAN SWEDIA DAN INDONESIA)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 September 2009

Yang menyatakan,

DIAN WAHYU WIDOWATI

NIM 050710101009

**OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA (PERBANDINGAN OMBUDSMAN
SWEDIA DAN INDONESIA)**

*OMBUDSMAN IN GOVERNMENTAL SYSTEM OF REPUBLIC OF
INDONESIA (A COMPARATIVE STUDY OF OMBUDSMAN IN SWEDEN
AND INDONESIA)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DIAN WAHYU WIDOWATI
NIM 050710101009**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 September 2009**

Oleh
Pembimbing

JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Pembantu Pembimbing

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.
NIP. 197509302002121006

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA (PERBANDINGAN OMBUDSMAN
SWEDIA DAN INDONESIA)**

*OMBUDSMAN IN GOVERNMENTAL SYSTEM OF REPUBLIC OF
INDONESIA (A COMPARATIVE STUDY OF OMBUDSMAN IN SWEDEN
AND INDONESIA)*

Oleh:

DIAN WAHYU WIDOWATI
NIM 050710101009

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.
NIP.197509302002121006

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 096001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Rabu
tanggal : 16
bulan : September
tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

RIZAL NUGROHO,S.H.,M.Hum.

NIP : 195611251984031002

IWAN RACHMAD S.,S.H.,M.H.

NIP :197004101998021001

Anggota Penguji

JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP : 195612061983031003

.....

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.

NIP : 197509302002121006

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul "**OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (PERBANDINGAN OMBUDSMAN SWEDIA DAN INDONESIA)**".

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku pembantu dekan I, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H. selaku pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. selaku pembantu Dekan III;
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jenber yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
4. Bapak Rizal Nugroho,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji dan selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Iwan Rachmad S ,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji dan dosen pamong KKM di Komisi Pemilihan Umum Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu sehingga terselesainya penulisan skripsi;
6. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan hingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman yang telah membantuku dalam segala hal yaitu: Mizwar, Om Sembodo, Bu RT, Ragil, Mbak Rani, Om Yovie, Mbak Yulia, Faiz, dan Novi terima kasih atas bantuannya dan kerja samanya dalam memberikan semuanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
12. Teman-teman KKM gelombang II Fakultas Hukum Universitas Jember, Sembodo, Rani, Novi, Ika, terima kasih atas diskusi penyusunan Skripsi ini dan telah mendampingi serta memberi dorongan semangat yang sangat besar kepada penulis semoga kelak langkah kecil kita berharga di kemudian hari;
13. Teman-teman mantan Kost : Shefia, Winda, Krisdian, Fenni, Vita, terima kasih segala bantuannya yang telah diberikan penulis semoga Allah memberikan balasan atas bantuan yang telah kalian berikan pada penulis;
14. Teman-teman Kost Jl. Nias IV no.6 : Mbak Aiz Moet, Ira, Hilmy, Shanti, Cipit, Mbak Lina, Mbak Retno, Diah serta Bapak/Ibu Kost tercinta terima kasih atas bantuan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

15. Teman-teman IMA hura-hura: Amir, Topik, Sembodo, Rani, Novi, B.RT, Ragil, Mizwar, Zaki, Bang Tigor, Swesty, Ratna, dan Yovie yang suka jalan-jalan untuk menghilangkan stress;
16. Muhammad Mizwar Guswan yang selalu menemaniku di dalam hatiku dan selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 15 September 2009

Penulis

RINGKASAN

Salah satu unsur dalam negara hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, yaitu pelayanan publik yang berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dalam pelayanan publik diharapkan adanya pelayanan yang prima terhadap warga masyarakat dan adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Bentuk pelayanan publik tidak hanya terbatas pada pelayanan di bidang administrasi umum. Tetapi meluas pada berbagai hal misalnya pelayanan dibidang hukum seperti kebutuhan penyelesaian sengketa oleh badan peradilan, perlindungan hukum, serta pelayanan pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu dibentuk lembaga pengawasan independen (mandiri) yang terlepas dari tatanan pemerintahan dan bekerja diberbagai bidang yang dianggap penting yang berkaitan dengan pelayanan publik. Lembaga independen diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Lembaga yang bersifat independen memiliki fungsi yang bersifat campuran, yaitu semi legislatif, regulating, semi administratif, bahkan semi yudikatif.

Pada intinya masyarakat menginginkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu tinggi sehingga cita-cita negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 “untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Keinginan masyarakat mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah dengan mengeluarkan Keppres No.44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Kedudukan Ombudsman Swedia sebagai *Parliamentary Ombudsman* karena pengangkatannya dilakukan oleh Parlemen sedangkan Kedudukan Ombudsman Indonesia yaitu sebagai Eksekutif Ombudsman karena diangkat oleh kepala pemerintah/eksekutif yaitu Presiden. Kedua, fungsi Ombudsman Swedia maupun Indonesia merupakan lembaga pemerintahan independen yang berfungsi menerima keluhan orang yang memberikan keluhan bedanya untuk di Swedia Ombudsman dibagi dalam empat (4) area tanggung jawab, dengan fungsinya masing-masing Sedangkan di Indonesia dimana satu Ombudsman mewakili berbagai macam bidang. Ketiga, Peran Ombudsman dalam perwujudan dari pelaksanaan *good governance* dapat dilihat dari tugas Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik yang menampung keluhan dari masyarakat atas kebijakan pejabat publik.

Saran penulis, supaya Ombudsman di Indonesia keberadaannya diperhatikan kembali agar dapat berjalan sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, sosialisasi keberadaan fungsi lembaga Ombudsman perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan Ombudsman sekaligus fungsinya yang berguna bagi mereka yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pejabat publik, sehingga perwujudan *good governance* dapat tercapai.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perbandingan Hukum Tata Negara	7
2.2 Pengertian Ombudsman.....	10
2.3 Negara Hukum.....	11

2.3.1 Unsur Negara Hukum	11
2.3.2 Macam Negara Hukum	13
2.4 Demokrasi.....	15
2.5 Sistem Demokrasi (Sistem Pemerintahan).....	17
2.5.1 Sistem Demokrasi (Sistem Pemerintahan) Presidensil.....	17
2.5.2 Sistem Demokrasi (Sistem Pemerintahan) Parlementer.....	19
2.6 Pengertian <i>Good Governance</i>	22
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Kedudukan Kelembagaan Ombudsman di Swedia dan Indonesia.....	25
3.1.1 Kedudukan Kelembagaan Ombudsman di Swedia.....	25
3.1.2 Kedudukan Kelembagaan Ombudsman di Indonesia.....	31
3.2 Persamaan dan Perbedaan Fungsi Ombudsman di Swedia dan Indonesia.....	39
3.2.1 Persamaan Fungsi Ombudsman di Swedia dan Indonesia.....	39
3.2.2 Perbedaan Fungsi Ombudsman di Swedia dan Indonesia.....	41
3.2 Peranan Ombudsman dalam Upaya Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	45
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN